BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rankhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2023

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

H.Fahmi Prima Laksana,SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680215 198903 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar tabel..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022. 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD..... 9

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD..... 25

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 30

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD..... 31

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.. 35

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN. 37

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional..... 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 38

3.3.Program dan Kegiatan..... 40

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Beserta Anggaran 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

4.1 Program BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2024..... 42

BAB V P E N U T U P..... 63

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan..... 63

5.2 Rencana Tindak Lanjut..... 63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.Tahapan penyusunan RKPD..... 4

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov.Kaltim dan pencapaian Renstra PD s/d tahun 2022 (tahun berjalan)..... 11

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim..... 29

Tabel 2.4 Review terhadap ranwal RKPD tahun 2022..... 32

Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024..... 36

Tabel 4.1 Program kegiatan BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024..... 42

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Prov.Kaltim..... Tahun 2024..... 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahan struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah dengan Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi rancangan akhir renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta yang berpedoman pada Rencana

Strategis (RENSTRA) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan penyusunan rancangan akhir Renja SKPD dalam tahun berjalan juga dilakukan Pengukuran Kinerja (PK) untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rancangan akhir Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPD tahun bersangkutan. Rancangan Akhir Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Rancangan Akhir Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RPD dan Renstra SKPD dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Rancangan Akhir Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan. Oleh sebab itu penyusunan Rancangan Akhir Renja BPKAD Tahun Anggaran 2024 diharapkan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD (tabel 1.1)

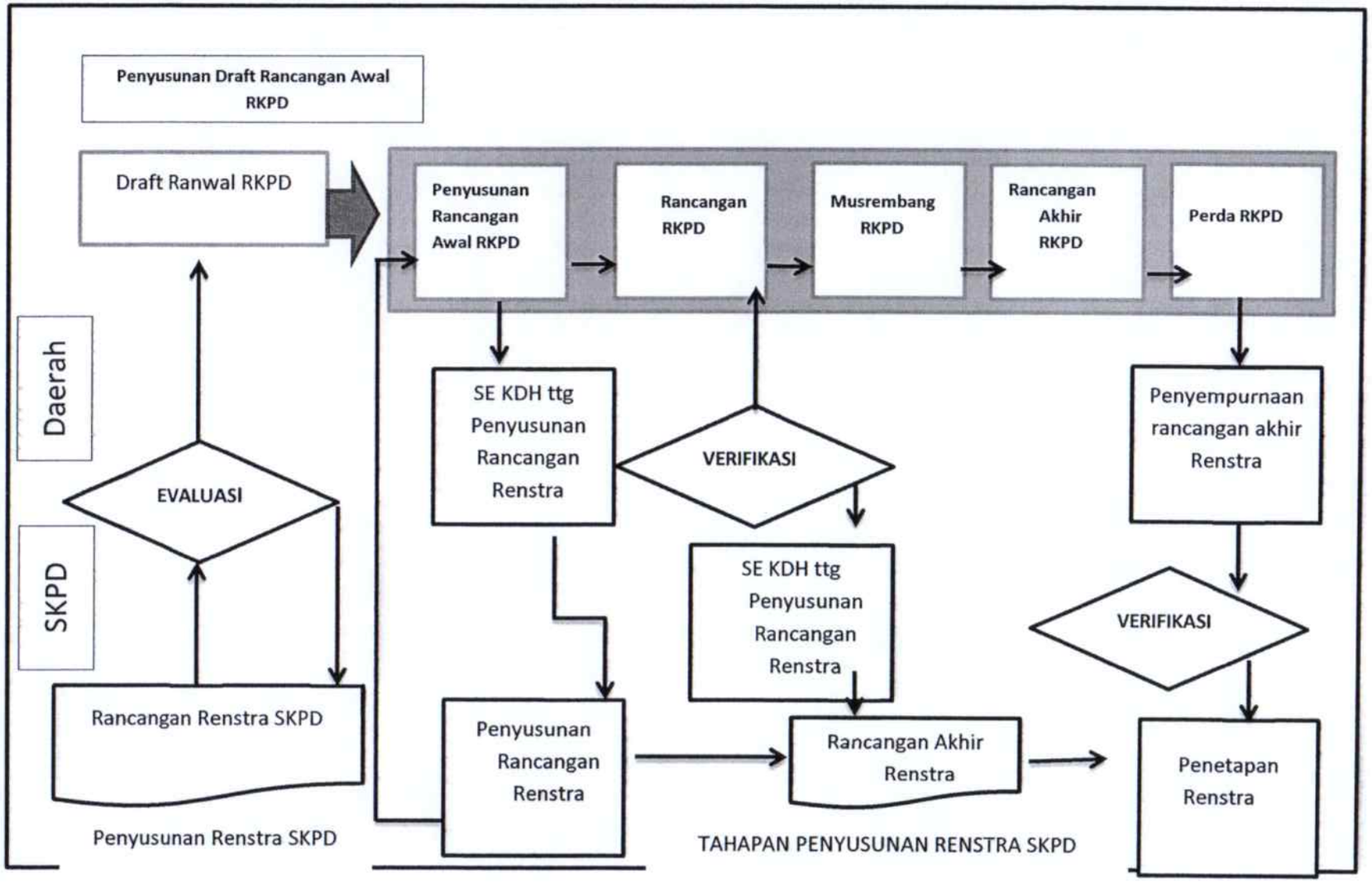

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Renja-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

a. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

a. Menjabarkan Renstra ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
c. Sebagai upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat :

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud Tujuan dan
1. 4 Sistematika Penulisan

Bab 2: Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu

Bab ini membuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat :

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

Bab 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab ini memuat : Rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kerja yang direncanakan dalam Renstra PD

Bab 5 : Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapain target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Ranca Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja *(performance budgeting).* Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku SKPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diverifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyakarat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama;

Tingkat efektifitas dan efisensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.

Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran keg.2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s.d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.03	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD**								
1.01	Perencanaan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD								
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok

1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap		2 lap	2 lap	2 lap
1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	7 lap	7 lap	7 lap		7 lap	7 lap	7 lap
1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat keselarasan laporan administrasi keuangan**								
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124 org	124 org	124 org	124 org		124 org	124 org	124 org
1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 dok	400 dok	400 dok	400 dok		400 dok	400 dok	400 dok
1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 dok	400 dok	400 dok	400 dok		400 dok	400 dok	400 dok
1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok
1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap

1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		3 dok	3 dok	3 dok
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap		3 lap	3 lap	3 lap
1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tingkat keselarasan laporan administrasi BMD milik SKPD**								
1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok
1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit
1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140 org	140 org	140 org	140 org		140 org	140 org	140 org
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 org	140 org	140 org	140 org		140 org	140 org	140 org
1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat keselarasan laporan administrasi BMD pada SKPD**							-	-

1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt		12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt		12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt		12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt		12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt		12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap		6 lap	6 lap	6 lap
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Tingkat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**							-	-
1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit
1.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit		20 unit	20 unit	20 unit
1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								

1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap	12 lap	12 lap
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit		6 unit	6 unit	6 unit
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit		25 unit	25 unit	25 unit
1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit		12 unit	12 unit	12 unit
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		5 unit	-5 unit	-5 unit
02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**									

1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Pedoman kebijakan keuangan daerah**								
01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
01.03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	37 dok	37 dok	37 dok	37 dok		37 dok	37 dok	37 dok
01.04	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	37 dok	37 dok	37 dok	37 dok		37 dok	37 dok	37 dok
01.05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	37 dok	37 dok	37 dok	37 dok		37 dok	37 dok	37 dok
01.06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	37 dok	37 dok	37 dok	37 dok		37 dok	37 dok	37 dok
01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		3 dok	3 dok	3 dok

01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 org	74 org	74 org	74 org		74 org	74 org	74 org
1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat keselarasan dokumen rancangan Perda & Perkada**								
1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	20 lap	20 lap	20 lap	20 lap		20 lap	20 lap	20 lap
1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	20 lap	20 lap	20 lap	20 lap		20 lap	20 lap	20 lap
1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	10 lap	10 lap	10 lap	10 lap		10 lap	10 lap	10 lap

1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap		3 lap	3 lap	3 lap
1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat keselarasan laporan perbendaharaan daerah**								
1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok
1.03.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 dok	460 dok	460 dok	460 dok		460 dok	460 dok	460 dok
1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok		16 dok	16 dok	16 dok
1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok

	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok
1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 dok	12000 dok	12000 dok	12000 dok		12000 dok	12000 dok	12000 dok
1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang		10 orang	10 orang	10 orang

1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Tingkat keselarasan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah**							-	-
1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap		4 lap	4 lap	4 lap
1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 dok	84 dok	84 dok	84 dok		84 dok	84 dok	84 dok
1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok
1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48 lap	48 lap	48 lap	48 lap		48 lap	48 lap	48 lap
1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	106 dok	106 dok	106 dok	106 dok		106 dok	106 dok	106 dok
1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas	Jumlah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok		6 dok	6 dok	6 dok

	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 dok	576 dok	576 dok	576 dok		576 dok	576 dok	576 dok
1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Aktuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Aktuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang		480 orang	480 orang	480 orang
1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga			-	-
1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan**	**Tingkat keselarasan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan**								
1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Investasi Pemerintah Daerah	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap		2 lap	2 lap	2 lap
1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 lap	10 lap	10 lap	10 lap		10 lap	10 lap	10 lap
1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 lap	21 lap	21 lap	21 lap		21 lap	21 lap	21 lap

1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap		16 lap	16 lap	16 lap
1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Tingkat keselarasan sistem informasi bidang keuangan daerah**								
1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		3 dok	3 dok	3 dok
02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase asset tetap (tanah & bangunan daerah yang diamankan).								
1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tingkat keselarasan antar data pengelolaan BMD**								
1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tingkat keselarasan antar data pengelolaan BMD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap		2 lap	2 lap	2 lap
1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap		3 lap	3 lap	3 lap

1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 dok	20 dok	20 dok	20 dok		20 dok	20 dok	20 dok
1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 lap	8 lap	8 lap	8 lap		8 lap	8 lap	8 lap
1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 org	50 org	50 org	50 org		50 org	50 org	50 org

Realisasi Persentase keuangan tahun 2023 sebesar (sampai tanggal 30 Juni2023/Triwulan II 2023) 50,05% Rp. 2.857.012.769.792,00,- Dari Pagu Anggaran Rp. 5.708.646.224.573,00,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT (Strength, Weaknes Opportunitity, Threats) ,CSF (Critical Success Factor).
2. RAD (Rapid Application Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Political, Economic, Social and Technological)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sebagai mediator antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

4. Memilki sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.2 Weaknesses (kelemahan), internal

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;

3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memilki kepekaan dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;

5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan aset serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) external

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;

4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP)/ purna tugas sehingga diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompentensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berakibat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

3. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang berdampak cukup signifikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama kesiapan *Stake Holder* dan Regulasi di Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada table 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra PD			
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2024	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu			100%	100%	100%	-
2.	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada Tahun ini (t-0)			40%	45%	47%	-
3.	1. Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan			82	84	86	-
	2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarakan nilai perolehan/ kontrak.
2. Pada Sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Untuk melakukan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan data yang akurat terkait Barang Milik Daerah dan Organisasi Khusus yang menanganinya.
5. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang terkait BMD Pengelola.
7. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah.
8. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terutama terkait Investasi Property.
9. Implementasi Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan penggunaan KKPD
10. Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daaerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset. Integrasi system ini juga sangat urgen dalam hal fungsi penatausahaan dengan aplikasi perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
7. Penyusunan peta proses bisnis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang dikuti dengan penyempurnaan dan peningkatan implementasi..

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribuan)	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu**		**5.540.936.891.552**			**Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu**		**5.540.936.891.552**	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.011.568.089,	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daeerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.011.568.089,	
b.	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		753.364.000,-	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		753.364.000,-	
c.	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	Kaltim/L uar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendahara an Daerah		6.275.277.885,-	Koordinasi dan Pengelolaan perbendahara an Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah		6.275.277.885,-	
d.	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan		5.166.231.160	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan		5.166.231.160	

	pelaporan keuangan daerah		akutansi dan pelaporan keuangan daerah			pelaporan keuangan daerah		akutansi dan pelaporan keuangan daerah			
e.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		5.520.265.915.418	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		5.520.265.915.418	
2	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**				6.973.836.564	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**				6.973.836.564	
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD		6.973.836.564	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD		6.973.836.564	-
3.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				91.653.469.537	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.061.085.464	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.061.085.464	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.187225.593	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.187225.593	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		922.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		922.200.000	

								Daerah			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.879.010.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.879.010.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.492.915.790	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.492.915.790	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		5.982.285.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		5.982.285.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.918.195.674	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.918.195.674	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim		10.210.551.216	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim		10.210.551.216	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan antara program/kegiatan, lokasi indicator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dn Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	-	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
			2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyakarat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 (RPD) dangan mengacu kepada Propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyakarat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Renstra Tahun 2024-2026 antara lain,

a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyakarat/ ASN

b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;

c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;

d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.

b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Progam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyakarat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sararan dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimatan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**
2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Beserta Anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024

Dokumen Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari Renstra Tahun 2024-2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Renja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4. 1.Program BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Program	Jumlah (Rp)
	SKPD :	
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	6.864.125.911.301,-
5,02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	6.139.049.000,-
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	70.756.985.354,-
	Pembiayaan :	
	Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000.000,-
	JUMLAH	**7.441.021.945.655,-**

TABEL 4.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						6.941.021.945.655,00							0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.941.021.945.655,00							0,00	
	5	02				KEUANGAN						6.941.021.945.655,00							0,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	86Indeks 100%			82 Indeks 100% %	70.756.985.354,00						84Indeks 100%	0,00	
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	880.357.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	303.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	91.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	39.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	47.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	151.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	151.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100%			100 %	37.286.006.354,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan			124 Orang/ Bulan	34.724.398.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	124 Orang/ Bulan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen			400 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen			400 Dokumen	242.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	52.041.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	65.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			3 Dokumen	121.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	47.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	32.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100%			100 %	433.675.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	85%			85 %	910.716.000,00			-	-	-	85%	0,00	
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	65.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang			140 Orang	585.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang			140 Orang	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	83.31%			100 %	5.182.417.000,00			-	-	-	83.31%	0,00	
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	108.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.301.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.301.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	216.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			6 Laporan	303.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	867.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	1.084.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100 %	1.227.555.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							0	1 Unit			0 0	793.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	793.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100 %	12.260.204.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	216.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100%			100 %	12.576.055.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit			25 Unit	650.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	11.405.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%			100 %	6.864.125.911.301,00						100%	0,00	
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100%			100 %	5.703.583.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	108.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	585.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	69.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	69.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.143.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen			3 Dokumen	117.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	1.951.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang			74 Orang	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	74 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100%			100 %	520.409.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
							0	20 Laporan			0 0	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan			20 Laporan	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan			20 Laporan	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													

							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan			10 Laporan	173.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan			3 Laporan	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100%			100 %	3.927.306.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	138.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan			1 Laporan	34.694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen			460 Dokumen	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	460 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen			16 Dokumen	1.137.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen			2 Dokumen	281.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan			12 Laporan	842.094.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen			12 Dokumen	151.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen			12000 Dokumen	581.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12000 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			1 Dokumen	346.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	325.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%			100 %	3.840.569.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan			4 Laporan	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen			84 Dokumen	1.517.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	84 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan			13 Laporan	60.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan			48 Laporan	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	48 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen			106 Dokumen	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	106 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen			6 Dokumen	173.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen			576 Dokumen	117.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	576 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	108.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang			480 Orang	913.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	480 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi													
							Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga			6 Lembaga	238.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Lembaga	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90%			90 %	6.849.440.164.301,00			-	-	-	90%	0,00	
	5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan			2 Laporan	91.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan			10 Laporan	1.386.874.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan			21 Laporan	669.575.084.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	21 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan			16 Laporan	4.792.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100%			100 %	693.880.000,00			-	-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	693.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	47%			40 %	6.139.049.000,00						45%	0,00	
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	47%			40 %	6.139.049.000,00			-	-	-	45%	0,00	
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	368.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	65.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	303.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	346.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	216.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan			2 Laporan	1.701.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan			3 Laporan	783.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	65.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen			20 Dokumen	1.301.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan			8 Laporan	260.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	336.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	303.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											J U M L A H	**6.941.021.945.655,00**							**0,00**	

KETERANGAN :

Selaku SKPD dan SKPKD berjumlah **Rp. 6.941.021.945.655,-**

Pembiayaan **Rp. 500.000.000.000,-**

(Penyertaan Modal pada BUMD)

Jumlah **Rp. 7.441.021.945.655**

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selain itu Rankhir Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Rankhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut,

Dengan tersusunnya Rankhir Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuik program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.